Ribuan Orang Saksikan Kirab Tebu Temanten

KR-Judiman

Sesaji 40 ayam panggang pada selamatan musim giling di PG- PS Madukismo.

BANTUL (KR) - Upacara ritual tradisi kirab tebu temanten yang merupakan bagian dari prosesi selamatan buka giling dan suling atau populer disebut Cembengan di PG-PS (Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus) PT Madubaru Kasihan Bantul, diselenggarakan Rabu (23/4). Kirab mulai dari halaman Gedung Madu Candhya kemudian menuju ke Masjid An Nur untuk dilakukan ijab qobul bagi sepasang tebu temanten Kyai Respati dari wilayah areal Klaten Jateng dengan Nyai Manis dari wilayah areal Bantul.

Sampai di stasiun gilingan pasangan tebu temanten Kyai Respati dan Nyai Manis diserahkan dari kepala bagian tanaman kepada kepala bagian pabrikasi melalui upacara 'srah-srahan' di stasiun gilingan dengan disaksikan Komisaris PT Madubaru Ir H KRT Madu Gondoningrat, Dirut PT Madubaru (PG-PS Madukismo) Drs H Budi Hidayat, jajaran Muspimkap Kasihan.

Kirab tebu temanten yang setiap tahun digelar di Madukismo menjadi hiburan masyarakat sekitar Madukismo. Upacara diakhiri dengan sesaji 40 ayam panggang dan menanam kepala sapi di stasiun gilingan.

Kemudian pasangan tebu temanten disemayamkan di stasiun gilingan yang nantinya akan menjadi cucuk lampah untuk digiling pertamakali pada permulaan musim giling 2025 yang direncanakan pada 4 Mei 2025, dengan target tebu yang digiling minimal 4,5 juta kuintal selama musim giling 150 hari.

Menurut KRT Madu Gondodiningrat, tebu temanten mempunyai filosofi bahwa sepasang tebu temanten tersebut akan menjadi induk yang akan mempunyai banyak anak, maka diharapkan tebu yang akan digiling bisa melimpah ruah. **(Jdm)**-f

MAFIA TANAH LIBATKAN TOKOH PUBLIK

Tanah Milik Warga Kasihan Raib

BANTUL (KR) - Massa dari Dusun Ngentak Kalurahan Bangunjiwo Kasihan n Bantul menggelar aksi damai, Rabu (23/4). Ratusan warga membubuhkan tandatangan di spanduk besar berisi petisi cinta dan peduli kasih bagi Mbah Tupon dan keluarga serta orang-orang yang terzalimi korban kasus penipuan komplotan mafia tanah.

Mbah Tupon harus kehilangan tanah sekitar 1.600 meter lebih. Mengherankan lagi, sertipikat tanah tersebut sudah berganti nama menjadi milik orang lain. Kasus ini kini ditangani penyidik Polda DIY.

Dugaan sementara kisruh terkait hilangnya tanah Mbah Tupon didalangi publik figur yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bantul. Selesai membubuhkan tanda tangan dilanjutkan doa bersama dipimpin Slamet Widodo dengan harapan Mbah Tupon mendapat keadilan.

Ketua RT 04 Dusun Ngentak Agil Dwi Raharjo didampingi Koordinator Aksi Riandani mengungkapkan, persoalan pelik yang tengah membelit Mbah Tupon terjadi tahun 2020. Waktu itu korban memiliki sebidang seluas total 2.100 meter persegi. Dari jumlah tersebut pemilik menjual sebagian tanahnya seluas 298 meter persegi pada kepada publik figur untuk keperluan membangunkan rumah anaknya.

Setelah terjadi kesepakatan harga Rp 1 juta permeter, pembayaran dilakukan bertahap. Selain menjual tanahnya, Mbah Tupon juga menghibahkan sebagian tanahnya untuk jalan kampung serta mewakafkan 53 meter persegi untuk pembangunan gudang RT. Sehingga tanah yang tersisa adalah 1.655 meter persegi.

"Waktu itu Mbah Tupon mendapat tawaran dari pembeli tanah, kekurangan pembayaran yang Rp 35 juta, 'diijoli' dengan memecah tanah sisa milik Mbah Topun menjadi empat sertipikat. Yakni tiga sertipikat untuk anak Mbah Tupon, satu sertipikat untuk Mbah Tupon," ujar Agil.

Dalam perjalanan kasus tersebut, Mbah Tupon memang beberapa kali membubuhkan tanda tangan ke berkas-berkas. Meski diketahui bahwa berkas yang ditandatangani waktu itu sama sekali tidak diketahui oleh korban. Setahu lelaki renta tersebut berkas yang ditandatangani merupakan bagian proses memecah sertipikat sesuai janji pelaku.

"Mbah Tupon ketika kami tanya mengatakan, bahwa dirinya hanya tanda tangan tapi tidak paham apa yang ditandatangani. Dia hanya menurut saja dengan orang suruhan pelaku yang bernama Tr dan Ft. Merekalah menjemput dan mengantar Mbah Tupon ke daerah Krapyak dan ke Jalan Solo untuk menandatangani berkas. Saat kami tanya lagi, Mbah Tupon tidak tahu dimana dirinya saat tanda tangan dan ditempat apa," ujar Agil. **(Roy)**-f

KR-Sukro Riyadi

Doa bersama menjadi penutup dari aksi peduli warga Ngentak agar tanah milik Mbah Tupon (dua dari kanan) kembali.

Sultan Resmikan IGD RSJ Grhasia

KR- Fira Nurfiani

Sultan meninjau Gedung IGD Dual Function RSJ Grhasia.

SLEMAN (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan HB X meresmikan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Dual Function di Kompleks Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia Pakem Sleman pada Kamis (24/04). IGD dual function adalah IGD yang mampu memberikan pelayanan gawat darurat psikiatri atau kesehatan jiwa sebagai pelayanan utama dan pelayanan kegawatdaruratan umum atau non jiwa

Hadir Sekda Sleman Susmiarto, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY Pembajun Setyaningastutie, Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah Bank BPD DIY R Agus Trimurjanto, Direktur dan seluruh jajaran manajemen RSJ Grhasia. Usai peresmian, Sultan meninjau fasilitas Gedung IGD Dual Function RSJ Grhasia.

Menurut Sultan, dengan pengalaman panjang dan SDM yang andal, Grhasia memiliki rekam jejak yang kuat dalam menangani pasien dengan pendekatan holistik baik medis, psikologis, dan sosial.

"Sehingga peresmian IGD ini bukan sekadar penambahan fasilitas fisik, tetapi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan respons layanan kesehatan jiwa yang cepat, tanggap, dan berorientasi pada keselamatan serta martabat pasien," ujarnya.

Ditambahkan, dengan hadirnya IGD ini RSJ Grhasia mempertegas perannya sebagai garda terdepan dalam penanganan kondisi psikiatrik akut. "Fasilitas ini menjadi titik awal bagi penyelamatan jiwa, stabilisasi krisis, hingga pengantar menuju proses pemulihan yang utuh," tutur Sultan. **(Ira)-f**

DPRD KABUPATEN SLEMAN
SUARA WAKIL RAKYAT
Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp.(0274)868413, Fax (0274)868413

KOMISI D DPRD KABUPATEN SLEMAN

Perlu Data, Pemetaan dan Treatment Bagi Korban PHK

KR-Istimewa

Rury Tyas Pramuri SE

SLEMAN (KR) - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai terjadi di beberapa daerah. Hal itu tak lepas faktor ekonomi yang saat ini kurang stabil. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan dan pemerataan terhadap korban PHK di Kabupaten Sleman. Kemudian perlu ada treatment bagi korban PHK di Kabupaten Sleman.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sleman B Rury Tyas Pramuri SE mengatakan, penyebab terjadinya PHK ini ada beberapa faktor. Di antaranya permintaan pasar menurun yang menyebabkan produksi serta pendapatan perusahaan menurun. Dengan kondisi keuangan tersebut, beberapa perusahaan melakukan pengurangan karyawan. "Ada beberapa penyebab para pekerja itu terkena PHK. Seperti perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga ada efisiensi karyawan," kata Rury.

Dengan melihat kondisi ekonomi seperti sekarang ini, Pemkab Sleman perlu melakukan pendataan dan pemetaan korban PHK. Hal itu untuk melihat masyarakat mana saja yang banyak terkena PHK. "Wilayah mana saja yang terkena PHK dan jumlah riilnya berapa. Untuk mengetahui itu, perlu ada pendataan dan pemerataan oleh dinas terkait," ujar politisi dari PDI Perjuangan.

Menurutnya, ada beberapa tipe korban PHK yakni ada yang sudah bangkit dengan mencari pekerjaan lain atau membuka usaha. Namun ada juga yang masih menganggur sehingga belum mendapat penghasilan. "Dari data tadi akan kelihatan. Mana saja yang sudah bangkit dan bekerja atau membuka usaha. Mungkin juga ada yang memang belum mendapat pekerjaan dan masih bingung mau usaha apa," kata anggota legislatif dari Dapil 3, yakni Kalasan, Prambanan dan Ngemplak ini.

Selanjutnya pemerintah daerah juga perlu memikirkan untuk memberikan treatment bagi korban PKH. Di antaranya memberikan bantuan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat dari korban PHK. "Jadi harus disesuaikan bakat dan minat mereka. Harapannya mereka kembali mempunyai pekerjaan maupun mampu membuka usaha sehingga nanti dapat mengurangi jumlah pengangguran di Sleman," pinta Rury.

Sedangkan Anggota Komisi D lainnya Ali Imron SPd mengatakan, pada Tahun 2024 lalu, ada dua indikator sasaran masih belum berhasil mencapai target 100 persen. Yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan persentase penduduk miskin. "Ternyata di Sleman masih ditemukan anak putus sekolah. Kemudian persentase keluarga miskin juga masih menjadi PR pemerintah daerah karena belum turun sesuai target," katanya.

Untuk mengatasi itu, perlu ada data dan peta. Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat mengolah dan menyiapkan solusi. Misalnya bagi anak yang tidak lanjut sekolah, perlu diketahui penyebabnya sehingga penanganannya akan lebih efektif. "Perlu data yang riil berapa jumlah anak yang putus sekolah. Dari situ akan diketahui penyebab anak-anak itu tidak sekolah. Setelah itu eksekutif mencarikan solusinya," terang anggota Fraksi PKS ini.

Sebagai kota pelajar, Imron berharap dunia pendidikan di Kabupaten Sleman lebih maju dan bagus dalam segala aspek. Mulai dari tenaga kependidikan baik aspek kualitas maupun kuantitas, ketersediaan sarana dan prasana pendidikan.

"Kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan harus diperhatikan. Termasuk memperhatikan kesejahteraan guru. Soalnya masih banyak guru yang mendapat guru di bawah UMR, utamanya guru honorer atau sekolah swasta," ucap mantan kepala sekolah ini. **(Sni)-f**

KR-Saifullah Nur Ichwan

Komisi D saat rapat internal dengan anggota.

KR-Istimewa

Ali Imron SPd